

**PENCATATAN PENYUSUTAN ASET TETAP BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) PADA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN MAGELANG**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Ida Dwi Lestari
18212078

**Program Studi Akuntansi
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
2021**

**PENCATATAN PENYUSUTAN ASET TETAP BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) PADA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN MAGELANG**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas
Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

Ida Dwi Lestari

18212078

**Program Studi Akuntansi
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG**

**PENCATATAN PENYUSUTAN ASET TETAP BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) PADA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN MAGELANG**



Disusun Oleh:

Nama: Ida Dwi Lestari
No.Mahasiswa: 18212078
Jurusan: Akuntansi

*Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal: 26 Juli 2021*

Pembimbing Intansi

(Finka Muri K., S.Sos., MM)

Dosen Pembimbing



(Afwan Fajrian Putra, S.E., M.Ak., Acc.,CA)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang menerapkan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 24 Juli 2021
Penulis

A yellow rectangular stamp with a grid pattern and a central emblem. The text on the stamp includes "KEMENTERIAN KEMAHIRAN DAN PERKAWINAN" at the top, "MATERAI" in the center, and "TEMPER" below it. At the bottom, there is a serial number "SI 2EAJX16153336". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ida Dwi Lestari

الجمعة الإسلامية الأندلسية

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SAW, atas rahmat, barokah, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Magang ini dengan judul **“Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang”**.

Penyusunan Laporan Magang ini selain merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Diploma III pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia juga bertujuan untuk menambah wawasan di bidang akuntansi sektor publik antara dunia kampus dengan dunia kerja yang akan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pada kesempatan ini ijin penulis untuk mengucapkan terima kasih dan rasa hormat atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, yaitu kepada :

1. Dra. Marfuah, M.Si, Ak., AC., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memungkinkan penulis untuk mengerjakan Tugas Akhir.
2. Bapak Afuan Fajrian Putra, S.E., M.Acc., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir yang telah

membimbing, memberi masukan sehingga penulis dapat lebih menyempurnakan Laporan Magang ini.

3. Ibu Selfira Salsabilla, S.E., Ak., selaku Dosen Wali yang telah membantu memperlancar penulis mengerjakan Tugas Akhir.
4. Seluruh Dosen, Staf, dan karyawan Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas jasa-jasanya selama penulis menuntut ilmu.
5. Pimpinan BPPKAD Kabupaten Magelang beserta jajaran pegawainya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan praktik kerja lapangan dan melakukan penelitian.
6. Bapak Aslachudin, S.Sos., selaku Kepala Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Magelang.
7. Ibu Finka Muri, S.Sos., MM., selaku Kepala Subbidang Pengelolaan Aset BPPKAD Kabupaten Magelang.
8. Bapak Adi Kuncoro, ST., MM., selaku Kepala Subbidang Pengolahan Data Aset yang telah mengizinkan saya untuk menggunakan data Aset Tetap sebagai bahan penyusunan Laporan Magang.
9. Ibu Ririn Setyowati, S.Sos., selaku fungsional umum bidang aset yang telah membimbing saya selama proses magang dan motivasinya.
10. Bapak Fitri Endro Zulianto, S.E., selaku fungsional umum bidang aset yang telah memberikan data mengenai Penyusutan Aset Tetap.
11. Ibu, Bapak, Kakak atas dukungan dan doanya.

12. Teman-teman dan semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga mengantarkan penulis untuk menyelesaikan Laporan Magang ini.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan dan kekhilafan karena keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan yang bersifat membangun atas laporan ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun kita bersama.

Wassalamu'alaikum Wr.W

Yogyakarta, 24 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Pemikiran.....	1
1.2. Tujuan Magang	4
1.3. Target Magang	4
1.4. Bidang Magang.....	5
1.5. Lokasi Magang.....	5
1.6. Jadwal Magang	5
BAB II: LANDASAN TEORI	6
2.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).....	6
2.2. PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap	7
2.3. Pengertian Aset Tetap	7
2.4. Jenis Aset Tetap	9
2.5. Penyusutan	10
2.6. Metode Penyusutan.....	11
2.7. Prosedur Penyusutan.....	13
2.7.1 Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan.....	13
2.7.2 Pengelompokan Aset	13
2.7.3 Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan.....	14
2.7.4 Penyajian Penyusutan	14
2.8 Neraca	15
BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF	17

3.1. Data Umum.....	17
3.1.1 Pembentukan BPPKAD Kabupaten Magelang.....	17
3.1.2 Uraian Tugas dalam Organisasi.....	18
3.1.3 Visi Misi Kepala Daerah.....	20
3.1.4 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.....	20
3.2. Data Khusus.....	20
3.2.1 Akuntansi Aset Tetap BPPKAD Kabupaten Magelang.....	20
3.2.2 Kebijakan Akuntansi Konruski dalam Pengerjaan.....	24
3.2.3 Penyusutan Aset Tetap BPPKAD Kabupaten Magelang.....	25
3.2.4 Akumulasi Penyusutan BPPKAD Kabupaten Magelang 2019.....	31
3.2.5 Jurnal Pencatatan Penyusutan Aset BPPKAD Kabupaten Magelang.....	38
3.2.6 Penyajian Penyusutan.....	39
 BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	 43
4.1. Kesimpulan.....	43
4.2. Saran.....	44

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1: Aset Tetap BPPKAD Kabupaten Magelang	21
Tabel 3. 2: Ilustrasi Penyajian Neraca BPPKAD Kabupaten Magelang	25
Tabel 3. 3: Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan BPPKAD Kabupaten Magelang	27
Tabel 3. 4: Akumulasi Penyusutan Aset BPPKAD Kab. Magelang 2019	31
Tabel 3. 5 : Reklas pada Akumulasi Penyusutan Aset 2019	34
Tabel 3. 6 : Beban Pada Akumulasi Penyusutan Aset	35
Tabel 3. 7: KIBB Peralatan dan Mesin (Alat Komputer Router)	38
Tabel 3. 8: Jurnal Pencatatan Penyusutan	39
Tabel 3. 9: Jurnal Pencatatan Penyusutan	39
Tabel 3. 10: Neraca Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019 dan 2018	39



DAFTAR GAMBAR

-



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Rekapitulasi Barang Milik Daerah Kabupaten Magelang
- Lampiran 2: Jurnal Umum-Penyesuaian BPPKAD Kabupaten Magelang
- Lampiran 3: Neraca BPPKAD Kabupaten Magelang
- Lampiran 4: Surat Pengantar Magang
- Lampiran 5: Surat Izin Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 6: Surat Permohonan Izin Pengambilan Data
- Lampiran 7: Surat Keterangan Magang



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, partisipasi kepada masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah melalui asas demokrasi dan keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Akuntabilitas merupakan prasyarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik, demokratis, dan dapat diandalkan. Salah satu upaya nyata untuk mewujudkan transparansi khususnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang sesuai dengan prinsip secara tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum (Prandara, 2020).

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual merupakan momentum perubahan standar akuntansi pemerintahan dari sebelumnya berbasis kas menjadi berbasis akrual. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Perubahan basis ini memiliki konsekuensi

besar terhadap perlakuan aset dimana penyusutan diperhitungkan dalam penilaian aset tetap.

Perubahan signifikan dalam basis akrual memberikan gambaran lengkap atas posisi keuangan, memberikan informasi yang akurat tentang hak dan kewajiban, dan berguna dalam mengevaluasi kinerja. Penerapan basis akrual juga merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, dimana penyajian laporan keuangan dengan basis akrual akan bersifat informatif untuk mencapai tujuan suatu periode akuntansi tertentu (Randa dan Bangun, 2020).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 menyatakan, aset pada sektor pemerintah merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan dapat diharapkan, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk alasan sejarah maupun budaya.

Aset tetap secara konsisten memiliki sifat yang menurun kapasitasnya sejalan dengan pemanfaatan maupun penggunaannya. Selanjutnya, otoritas publik atau pemerintah berkewajiban untuk memperkenalkan informasi tentang nilai aset tetap dengan cara yang memadahi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan pengelolaan aset. Agar kebutuhan tersebut maksimal, perlu adanya

informasi yang memuaskan mengenai aset tetap, hal ini dapat terpenuhi jika otoritas publik menerapkan sistem akuntansi yang informatif dengan cara yang tepat dan nyaman. Salah satu informasi yang diperlukan untuk menentukan pilihan pengolahan aset adalah mengenai nilai wajar aset. Nilai wajar dan nilai aset tetap pemerintah yang disajikan harus dimungkinkan dengan memperkenalkan kebijakan penyusutan. Uraian tersebut tertuang dalam Buletin Teknis No. 18 Tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua.

BPPKAD Kabupaten Magelang memiliki aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dapat digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap yang menetapkan klasifikasi aset tetap atas dasar kesamaan sifat atau kegiatan operasi entitas sebagaimana dimaksud dalam Bab IX meliputi, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menetapkan sistem penghitungan dan pencatatan aset tetap daerah dengan mengacu pada Peraturan Bupati Magelang No 48 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Aset Tetap, mulai dari sistem penghitungan dan pencatatan aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap, dan pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan pada saat

aset tetap diperoleh sampai dengan aset tetap dihapuskan. Penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap yang diterbitkan Permendagri Nomor 1 tahun 2019 dilakukan pada setiap aset dengan jangka waktu penyusutan aset tetap yang ditentukan minimal setiap satu kali periode akuntansi. Hasil perhitungan dan pencatatan menjadi acuan penyusunan laporan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENCATATAN PENYUSUTAN ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN MAGELANG”**

1.2. Tujuan Magang

Tujuan penulisan laporan magang ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang.

1.3. Target Magang

Adapun target yang ingin dicapai penulis yaitu mampu menjelaskan bagaimana Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang.

1.4. Bidang Magang

Pada saat pelaksanaan magang, penulis ditempatkan pada bidang Aset BPPKAD yang terdiri atas 3 (tiga) sub bidang yaitu Analisa Kebutuhan, Pengelolaan Aset, dan Pengolahan Data Aset. Di antara sub bidang tersebut penulis berfokus pada bidang Pengolahan Data Aset BPPKAD Kabupaten Magelang.

1.5. Lokasi Magang

Dalam pelaksanaan magang, penulis telah melaksanakan kegiatan magang pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang yang beralamatkan di **Jalan Soekarno-Hatta No.07, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56511.**

1.6. Jadwal Magang

Penulis melaksanakan magang di BPPKAD Kabupaten Magelang selama 1 (satu) bulan, yaitu dari tanggal 01 Maret s.d 31 Maret 2021.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LPKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKPD). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan yang diharapkan dapat tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Ariyanto, 2020).

Pernyataan Permendagri No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah standar yang ditetapkan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan publik. Sesuai PMK No. 238/PMK.05/2011 Pasal 1, Standar Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian langkah untuk memenuhi fungsi akuntansi dari pemeriksaan keuangan sampai pengungkapan di dalam organisasi pemerintah.

Menilik pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dikemukakan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah merupakan aturan yang perlu diterapkan terhadap perencanaan serta penyajian laporan guna meningkatkan kualitas pelaporan di Indonesia.

2.2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap

Maksud dari pernyataan standar ini ialah untuk menerapkan perlakuan akuntansi atas aset, termasuk penentuan jumlah tercatat aset, dan penurunan nilai aset tetap.

Standar akuntansi pemerintah berlaku untuk semua instansi pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan mengelola laporan keuangannya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan sebagaimana mestinya. Namun, hal ini tidak berlaku untuk eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam terbarukan, penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbarui. Akan tetapi, pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk memelihara aktivitas aset tersebut, dan dapat dipisahkan dari harta kekayaan tersebut.

2.3. Pengertian Aset Tetap

Aset Tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, tidak untuk diperjualbelikan. Tujuan aset tetap adalah untuk mengetahui diperoleh pada suatu perusahaan bagaimana pengakuan aset tetap dapat yang menjadi objek. Sehingga penulis dapat lebih objektif dalam memberikan informasi mengenai aset perusahaan (Rudianto, 2015).

Martani (2012), mencirikan aset tetap sebagai aset yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi dan penyediaan barang maupun jasa, disewakan atau untuk tujuan administrasi, dan digunakan lebih dari satu periode.

Seperti yang didefinisikan oleh Samryn (2016), Aset Tetap adalah sekelompok aset perusahaan yang memenuhi semua kriteria berikut :

- 1) Memiliki masa manfaat atau umur ekonomis lebih dari satu tahun.
- 2) Digunakan dalam mendukung kegiatan perusahaan.
- 3) Fisik barangnya dapat dilihat dan disentuh, sehingga biasa juga disebut Aktiva Tetap.
- 4) Biasanya nilai perolehan relatif besar.

Berdasarkan definisi aset tetap yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap yaitu aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan serta digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat umum.

Jenis-jenis aset tetap berdasarkan PSAP 07 paragraf 4, terdiri dari :

- 1) Tanah, yaitu tanah yang diperoleh dengan tujuan dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam keadaan siap pakai.
- 2) Peralatan dan mesin, termasuk mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh peralatan lain yang nilainya signifikan serta dalam kondisi siap pakai.
- 3) Gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan kondisi siap pakai.

- 4) Jalan, irigasi, dan jaringan, dimana mencakup layanan yang dibangun pemerintah, dimiliki dan dikuasai pemerintah, serta dalam kondisi siap pakai.
- 5) Konstruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- 6) Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap tidak dikelompokkan ke dalam aset tetap diatas, dan diperoleh serta dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam keadaan siap pakai.

2.4. Jenis Aset Tetap

PSAP 07 menyebutkan aset tetap menurut jenisnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Aset tetap tidak dapat disusutkan

Aset tetap yang tidak dapat disusutkan adalah aset yang memiliki umur dan masa manfaat yang tidak terbatas. Misalnya: tanah untuk gedung perkantoran atau untuk bangunan pabrik. Harga perolehan atas tanah tersebut tidak perlu disusutkan karena masa manfaat tidak terbatas.

- 2) Aset tetap dapat disusutkan

Aset tetap yang dapat disusutkan adalah aset atau umur masa manfaatnya terbatas. Jenis dari aset tetap yang dapat disusutkan terdiri dari dua kelompok yaitu:

- a) Aset tetap yang bila masa manfaatnya berakhir dapat diganti dengan aset yang sejenis. Aset jenis ini dialokasikan sebesar biaya perolehan melalui penyusutan (depresiasi) misalnya: bangunan, kendaraan, mesin-mesin, peralatan kantor, dan lain sebagainya.
- b) Suatu aset tetap yang telah habis masa manfaatnya tidak dapat digantikan oleh suatu aset tetap sejenis yang biaya perolehannya dapat disusutkan dengan menggunakan metode penyusutan. Misalnya: tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya.

2.5. Penyusutan

Penyusutan merupakan perubahan nilai sebanding dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset yang tetap semakin berkurang dalam jangka panjang karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, nilai aset tetap ini juga semakin berkurang. (Nadir, 2019).

Menurut Martani (2012), penyusutan merupakan suatu metode mengalokasikan biaya perolehan aset tetap untuk secara sistematis mengurangi nilai aset selama masa manfaat aset.

Penyusutan yang ditetapkan dalam PSAP 07 di mana berkurangnya batas dan nilai suatu sumber daya. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda penggunaan premis akumulasi di SAP.

Berdasarkan definisi penyusutan diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusutan adalah suatu aset yang akan mengalami penyusutan selama masa manfaatnya.

KSAP menetapkan Buletin Teknis No. 18 Tentang Akuntansi Berbasis Akrual sebagai pedoman dalam pengelolaan Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual yang diterapkan mulai tahun 2015. Buletin Teknis mengidentifikasi tujuan utama penyusutan untuk menghindari penumpukan sumber daya untuk membayar hutang atau penghapusbukuan aset tetap. Tujuan utamanya adalah untuk menyesuaikan nilai aset serta mengetahui nilai wajarnya secara lebih rinci.

Untuk menerapkan penyusutan, persyaratan yang harus dipenuhi :

- 1) Aset tetap harus dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaat serta aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya.
- 2) Nilai aset tetap merupakan prasyarat untuk penyusutan. Oleh karena itu, PSAP menerapkan nilai historis, dengan pengecualian keadaan yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis.
- 3) Masa manfaat dan kapasitas aset tetap. Besaran manfaat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada pula yang tidak. Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini harus diketahui untuk menentukan penyusutan. Untuk aset tetap yang potensi manfaatnya berkaitan dengan masa manfaat, metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda dapat dipilih.

2.6. Metode Penyusutan

PSAP No 07 memperkenalkan tiga jenis metode penyusutan, yaitu :

- a. Metode garis lurus (*straight line method*)

Metode ini sering digunakan dalam akuntansi. Selain itu, terdapat dua rumus yang dapat dipakai yaitu metode perhitungan dengan nilai residu dan tanpa nilai residu.

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Nilai perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Masa manfaat}}$$

b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)

Metode ini merupakan metode penyusutan dipercepat, dimana sebagian besar penyusutan yang terkait dengan aset diakui selama beberapa tahun pertama masa manfaat aset tersebut.

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Nilai perolehan}}{\text{Masa manfaat}} \times 2$$

c. Metode unit produksi (*unit of production method*).

Metode ini adalah salah satu cara menghitung aset tetap yang menghasilkan sejumlah beban yang sama pada tiap unit yang dimanfaatkan.

$$\text{Penyusutan} = (\text{NP} - \text{NR}) \times \frac{\text{Pemakaian}}{\text{Kapasitas Maksimal}}$$

2.7. Prosedur Penyusutan

Buletin Teknis Nomor 18 Tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual menyebutkan dan mendefinisikan prosedur penyusutan yaitu dengan mengidentifikasi aset yang dapat disusutkan, mengelompokan aset tetap, menghitung dan mencatat penyusutan, menyajikan penyusutan,

2.7.1 Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan

Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan jika unit akuntansi mengakui adanya penyusutan dan mengecualikan tanah dan konstruksi dalam pengerjaan karena tidak dapat disusutkan. Dengan memperhatikan hal berikut :

- a. Tampilkan daftar aset tetap di neraca.
- b. Identifikasikan apakah neraca menyajikan Tanah dalam Konstruksi dalam Pengerjaan.
- c. Apabila terdapat Tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan di neraca, maka hal tersebut dikecualikan dari daftar aset yang disusutkan.

2.7.2 Pengelompokan Aset

- a. Aset Berkelompok

Selain diterapkan pada aset tetap individual, dimungkinkan juga untuk secara bersamaan menyusutkan sekelompok aset. Hal ini tentu membutuhkan pemahaman tentang bagaimana aset dikelompokkan. Aset harus disusutkan dalam kelompok, tetapi ketika disusutkan secara individual, maka masalah berikut muncul. Sebagai aset yang manfaatnya hanya secara berkelompok namun digunakan secara

individual, maka konsep manfaat berkelompok menjadi dilanggar. Jika masalah terjadi, pengakuan penyusutan tidak sesuai dengan manfaatnya.

b. Aset Individual

Untuk aset yang tidak memenuhi standar di atas, seperti gedung dan bangunan dapatkan catatan nilai dasar setiap aset. Kemudian susun daftar aset individual dan nilai dasar atau awalnya.

2.7.3 Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan

Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap sebagaimana tercantum dalam Buletin Teknis No. 18, dengan menghitung dan mencatat penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan metode yang pilih/ditentukan.

Perhitungan dan pencatatan aset harus konsisten sampai dengan akhir masa manfaat aset tersebut dimana akun Beban Penyusutan di debit dan Akumulasi Penyusutan di kredit. Setelah itu, menyusun daftar penyusutan guna memudahkan dalam menghitung penyusutan pada periode tahun setelahnya dan dapat menggunakan salah satu metode penyusutan diantara Metode Garis Lurus, Metode Saldo Menurun Ganda, atau Metode Unit Produksi.

2.7.4 Penyajian Penyusutan

Penyusutan dicatat pada Neraca dan dalam Laporan Operasional, diakui di Neraca sebagai Akumulasi Penyusutan yang mengurangi biaya perolehan aset dan disajikan pada Laporan Operasional sebagai Beban

Penyusutan. Neraca mencakup akumulasi penyusutan dan nilai perolehan aset tetap, sehingga nilai tercatat aset dapat dilihat sebagai contoh potensi manfaat yang dapat diharapkan dari aset tetap ini. PSAP 07 memberikan informasi penyusutan yang harus disajikan dalam laporan keuangan yaitu nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat, dan nilai buku.

2.8 Neraca

Neraca pemerintah daerah menyajikan laporan posisi keuangan berupa aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal laporan keuangan diterbitkan. Aset, kewajiban dan ekuitas dana adalah komponen utama laporan tersebut dan dapat diklasifikasikan ke dalam sub-akun neraca, mencakup :

1) Aset

Aset yang dikelola dan/atau dimiliki oleh pemerintah berdasarkan peristiwa masa lalu dan membawa manfaat ekonomi dan atau sosial baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan dan sumber daya terpilih yang tersedia bagi penyedia layanan publik. Aset dibedakan menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar.

2) Utang/Kewajiban

Utang merupakan kewajiban yang timbul di masa lalu dan penyelesaiannya menentukan arus keluar sumber daya ekonomi dari pemerintah. Salah satu karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah memiliki kewajiban saat ini dan penyelesaiannya akan

mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan.

Utang/Kewajiban dapat dibagi menjadi dua kelompok :

- a. Kewajiban jangka pendek adalah utang pemerintah daerah yang jatuh temponya kurang dari satu tahun.
- b. Kewajiban jangka panjang merupakan utang pemerintah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun (12 bulan) sejak tanggal penutupan.

3) Ekuitas

Ekuitas adalah hak atas aset setelah dikurangi kewajiban pada tanggal neraca. Saldo ekuitas di Neraca diperoleh dari saldo akhir periode..

4) Laporan Operasional

Laporan operasional memberikan gambaran tentang sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dimasukkan ke dalam laporan operasional meliputi pendapatan operasional, beban, transfer, dan pos-pos khusus.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1. Data Umum

3.1.1 Sejarah Pembentukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang serta tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Pengelolaan Aset Daerah, dan Prosedur Kerja.

Pembentukan BPPKAD Kabupaten Magelang sebagai salah satu organisasi teknis daerah didorong oleh perubahan pengelolaan keuangan daerah, yaitu harus disusun laporan keuangan daerah dan pernyataan pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk anggaran daerah. Konsekuensi logis dari perubahan kewajiban ini adalah dibentuknya organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan pada tahun 2017 diubah menjadi Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang melakukan integrasi pengelolaan keuangan, termasuk pencatatan dan pertanggungjawaban arus kas masuk

dan keluar, serta aset/kekayaan daerah. Semakin ketatnya persaingan antar daerah memaksa pemerintah daerah untuk melakukan perubahan-perubahan kreatif menuju *good governance* dan demokrasi. Perubahan yang paling mendasar adalah pengelolaan keuangan daerah yang harus menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan masyarakat, dan teknologi yang membutuhkan tata kelola dan akuntabilitas yang baik untuk mencapai transparansi dalam pengelolaan keuangan.

3.1.2 Uraian Tugas dalam Organisasi

Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang memimpin pelaksanaan tugas BPPKAD dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Tugas pokok BPPKAD Kabupaten Magelang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Kepala BPPKAD membawahi Sekretariat dan 6 (enam) Bidang sebagai berikut :

- a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1) Sub bagian Program
 - 2) Sub bagian Keuangan
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Penetapan Pendapatan membawahi 3 (tiga) Subbid, yaitu :

- 1) Sub bidang Perencanaan Pendataan
 - 2) Sub bidang Pendataan Pendapatan
 - 3) Sub bidang Penetapan Pendapatan
- c. Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan dan Sengketa Pajak membawahi 3 (tiga) Subbid, yaitu :
- 1) Sub bidang Pelayanan
 - 2) Sub bidang Penagihan Pendapatan
 - 3) Sub bidang Verifikasi dan Sengketa Pajak
- d. Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Subbid, yaitu :
- 1) Sub bidang Perencanaan Anggaran
 - 2) Sub bidang Penyusunan Anggaran
- e. Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Subbid, yaitu :
- 1) Sub bidang Pengendalian Perbendaharaan
 - 2) Sub bidang Kas Daerah
- f. Bidang Akuntansi membawahi 2 (dua) Subbid, yaitu :
- 1) Sub bidang Akuntansi
 - 2) Sub bidang Pelaporan
- g. Bidang Aset membawa 3 (tiga) Seksi, yaitu :
- 1) Seksi Analisa Kebutuhan
 - 2) Seksi Pengelolaan Aset
 - 3) Seksi Pengolahan Data Aset

3.1.3 Visi Misi Kepala Daerah

BPPKAD Kabupaten Magelang menggunakan Visi dan Misi yang ditetapkan Kepala Daerah Kabupaten Magelang, dimana Visi tersebut yaitu, “Kabupaten Magelang yang semakin SEMANAH (Sejahtera, Maju, Dan Amanah)”, sedangkan Misi yang diemban BPPKAD Kabupaten Magelang yaitu, “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Amanah”.

3.1.4 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang adalah asas-asas, konveksi, ketentuan khusus yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode dan antar entitas. Kebijakan Akuntansi untuk Aset Tetap mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi untuk aset tetap dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

3.2. Data Khusus

3.2.1 Akuntansi Aset Tetap BPPKAD Kabupaten Magelang

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebutkan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dapat digunakan dalam kegiatan pemerintah atau masyarakat umum, yang tidak

dimaksudkan untuk dijual dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Tabel 3. 1: Aset Tetap BPPKAD Kabupaten Magelang

No	Keterangan	Jumlah	Jumlah Harga (Rp.)
1	TANAH	-	-
2	Tanah	171	88.545.972.768
3	PERALATAN DAN MESIN	-	-
4	Alat bersih	4	1.538.809.334
5	Alat angkutan	238	12.833.236.348
6	Alat bengkel dan alat ukur	21	194.064.066
7	Alat Pertanian	-	-
8	Alat kantor dan rumah tangga	1.629	4.038.761.494
9	Alat studio komunikasi dan pemancar	78	363.870.194
10	Alat kedokteran dan alat kesehatan	-	-
11	Alat laboratorium	-	-
12	Alat persenjataan	382	352.053.460
13	Alat komputer	342	3.382.412.073
14	Alat eksplorasi	-	-
15	Alat Pengeboran	-	-
16	Alat Produksi, pengelolaan dan pemurnian	-	-
17	Alat bantu eksplorasi	-	-
18	Alat keselamatan kerja	-	-
19	Alat peraga	-	-
20	Peralatan proses produksi	-	-
21	Rambu rambu	-	-
22	Peralatan olahraga	-	-
23	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-
24	Bangunan gedung	391	46.797.537.083
25	Monumen	12	919.765.915
26	Bangunan menara	-	-
27	Tugu titik kontrol/pasti	5	410.000.000
28	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-
29	Jalan dan jembatan	4	3.264.330.639
30	Bangunan air	23	607.682.874
31	Instalasi	2	113.700.177
32	Jaringan	-	-

33	ASET TETAP LAINNYA	-	-
34	Bahan perpustakaan	-	-
35	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	-	-
36	Hewan	-	-
37	Biota Perairan	-	-
38	Tanaman	-	-
39	Barang koleksi non budaya	-	-
40	Aset tetap dalam renovasi	-	-
41	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
42	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
	Jumlah	3.302	163.362.196.425

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel diatas, BPPKAD Kabupaten Magelang mengklasifikasikan aset tetap ke dalam 6 (enam) akun berikut :

- 1) Tanah yaitu tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah disini merupakan tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan yang dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun diatasnya.
- 2) Peralatan dan mesin yang dikendalikan oleh pemerintah, digunakan dalam pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan siap digunakan. Mencangkup diantaranya: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran, alat persenjataan, komputer, alat eksploitasi, alat pemboran, alat produksi, pengelolaan, dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi.

- 3) Gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan seperti, bangunan gedung, monument, bangunan menara, dan rambu-rambu.
- 4) Jalan, irigasi, dan jaringan adalah yang dibangun oleh pemerintah daerah dan dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dalam keadaan siap pakai yang mencakup: jalan dan jembatan, bangunan air, instansi, dan jaringan.
- 5) Konstruksi dalam pengerjaan termasuk aset tetap yang sedang dalam penyelesaian, yaitu sejak tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- 6) Aset tetap lainnya, aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap diatas, dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Meliputi: koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga, hewan, tanaman.

Pengelompokan aset diatas dapat dilihat berdasarkan jenisnya, yaitu aset tetap tidak dapat disusutkan dimana aset tersebut memiliki umur dan masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya tanah. Kemudian aset tetap dapat disusutkan, yang bila masa manfaatnya berakhir dapat diganti dengan aset yang sejenis. Misalnya bangunan, kendaraan, mesin-mesin, peralatan kantor, dan lainnya. Selanjutnya adalah aset yang masa

manfaatnya habis dan tidak dapat digantikan dengan aset yang sejenis, seperti sumber daya alam.

3.2.2 Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Sehubungan dengan Peraturan Bupati No. 53 Tentang Akuntansi Pemerintah Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dalam menetapkan kebijakan akuntansi yang terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan yang terlampir pada Bab XII, adalah aset yang masih dalam pengerjaan termasuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang masih dalam proses pembangunan serta memerlukan jangka waktu tertentu.

Konstruksi dalam pengerjaan akan dialihkan ke aset tetap terkait apabila konstruksi tersebut secara substansial telah selesai dikerjakan, dapat memberikan keuntungan/jasa sesuai dengan tujuan perolehan dan dinyatakan siap pakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, termasuk biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap dalam Neraca Pemerintah daerah sebagai berikut :

Tabel 3. 2: Ilustrasi Penyajian Konstruksi dan Bangunan pada Neraca
BPPKAD Kabupaten Magelang

Tanah		88.545.972.768,00
Peralatan dan Mesin	22.703.206.969,00	
Gedung dan Bangunan	48.127.302.998,00	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.985.713.690,00	
Aset Tetap Lainnya	0	
Akumulasi Penyusutan	<u>-39.602.748.318,02</u>	
Nilai Buku Aset		35.213.475.338,98
Konstruksi Dalam Bangunan		<u>0</u>
		123.759.448.106,98

Sumber : Data diolah

3.2.3 Penyusutan Aset Tetap BPPKAD Kabupaten Magelang

PSAP No.07 paragraf 53 memberikan penjelasan bahwa penyusutan adalah alokasi yang sistematis nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset. Sedangkan pada paragraf 57 memperkenalkan tiga jenis metode penyusutan, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang menggunakan metode garis lurus, dimana metode ini lebih sederhana karena beban penyusutan dibagi rata selama umur manfaat sebagai berikut :

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Manfaat}}$$

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap disajikan dalam Peraturan Bupati Daerah No. 53 Tahun 2020 Lampiran Bab XI tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, dimana seluruh aset tetap disusun sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.



Tabel 3. 3: Penyusutan Rinci KIBC Gedung dan Bangunan 2018-2019 BPPKAD Kabupaten Magelang

No.	Keterangan	Harga Perolehan	Tahun	Umur	Akumulasi Awal	Beban	Akumulasi Akhir	Nilai Residu	Umur sisa
4	Bangunan gedung.Sarana perlengkapan permanen	100.469.700	2.018	25	4.018.788,00	4.018.788,00	8.037.576,00	92.432.124,00	23
5	Bangunan gedung.Sarana perlengkapan permanen	107.578.875	2.018	25	4.303.155,00	4.303.155,00	8.606.310,00	98.972.565,00	23
6	Bangunan gedung.Sarana perlengkapan permanen	107.578.875	2.018	25	4.303.155,00	4.303.155,00	8.606.310,00	98.972.565,00	23
7	Bangunan gedung.Sarana perlengkapan permanen	107.578.875	2.018	25	4.303.155,00	4.303.155,00	8.606.310,00	98.972.565,00	23
8	Bangunan gedung.Sarana perlengkapan permanen	107.578.875	2.018	25	4.303.155,00	4.303.155,00	8.606.310,00	98.972.565,00	23
9	Bangunan gedung.Sarana perlengkapan permanen	113.204.665	2.018	25	4.528.186,60	4.528.186,60	9.056.373,20	104.148.291,80	23
10	Bangunan gedung.Sarana perlengkapan permanen	113.204.665	2.018	25	4.528.186,60	4.528.186,60	9.056.373,20	104.148.291,80	23
11	Bangunan gedung.Sarana perlengkapan permanen	113.204.665	2.018	25	4.528.186,60	4.528.186,60	9.056.373,20	104.148.291,80	23
12	Bangunan gedung.Sarana perlengkapan permanen	113.204.665	2.018	25	4.528.186,60	4.528.186,60	9.056.373,20	104.148.291,80	23

13	Bangunan gedung.Sarana perlengkapan permanen	113.204.665	2.018	25	4.528.186,60	4.528.186,60	9.056.373,20	104.148.291,80	23
14	Bangunan gedung.Sarana perlengkapan permanen	13.659.300	2.018	25	546.372,00	546.372,00	1.092.744,00	12.566.556,00	23
15	Bangunan gedung.Sarana perlengkapan permanen	14.951.600	2.018	25	598.064,00	598.064,00	1.196.128,00	13.755.472,00	23
16	Bangunan gedung.Sarana perlengkapan permanen	89.947.500	2.019	25	-	3.597.900,00	3.597.900,00	86.349.600,00	24
17	Bangunan gedung.Sarana perlengkapan permanen	64.052.500	2.019	25	-	2.562.100,00	2.562.100,00	61.490.400,00	24
18	Monumen.Tugu peringatan.Baleho	150.092.790	2.019	50	-	3.001.855,80	3.001.855,80	147.090.934,20	49

Sumber : Laporan Penyusutan KIBC Gedung Dan Bangunan 2019 BPPKAD Kabupaten Magelang

Dari tabel yang penulis sajikan diatas, merupakan data akumulasi penyusutan untuk KIBC yaitu Gedung dan Bangunan. Dimana perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap pada gedung dan bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp 100.469.700 untuk Bangunan gedung sarana perlengkapan permanen, dan dengan umur manfaat 25 tahun menggunakan rumus metode garis lurus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rumus Penyusutan} &= \frac{\text{NP} - \text{NR}}{\text{UM}} \\ &= \frac{\text{Rp } 107.578.875 - \text{Rp } 98.972.565,00}{25} \\ &= \text{Rp } 8.606.310,00 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui penyusutan untuk Bagunan Pertokoan/Koperasi/Pasar Darurat tahun 2015 sebesar Rp 8.606.310,00 dan dinyatakan sebagai Akumulasi Penyusutan Akhir.

Kemudian untuk Beban dihitung dari Nilai Perolehan dibagi dengan Umur Manfaat dengan Rumus :

$$\text{Beban} = \frac{\text{NP}}{\text{UM}}$$

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 107.578.875 \\ \text{Beban} &= \frac{\quad}{25} \\ &= \text{Rp } 4.303.155,00 \end{aligned}$$

Untuk Akumulasi Penyusutan Awal, masih belum diakui adanya beban, sehingga dari nilai Akumulasi Akhir dikurangi dengan nilai Beban maka diketahui Akumulasi Penyusutan Awal dari aset tetap tersebut yaitu sebesar Rp 4.303.155,00.

3.2.4 Akumulasi Penyusutan BPPKAD Kabupaten Magelang 2019

a. Akumulasi Penyusutan Awal

Tabel 3. 4: Akumulasi Penyusutan Aset BPPKAD Kab. Magelang 2019

No.	Keterangan	Perolehan		Akumulasi Awal
		Jml	Harga	
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	4	1.538.809.334	1.188.142.857,43
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	238	12.833.236.348	9.477.783.778,41
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Dan Alat Ukur	21	194.064.066	168.223.099,80
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor & Rumah Tangga	1.629	4.038.761.494	3.132.066.124,00
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	78	363.870.194	308.089.700,00
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Dan Kesehatan	-	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Peralatan	382	352.053.460	305.368.740,00
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	342	3.382.412.073	3.120.451.505,00
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	-

12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemurnian	-	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Peraga	-	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Proses/Produksi	-	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Rambu - Rambu	-	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga	-	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	391	46.797.537.083	13.833.708.433,46
21	Akumulasi Penyusutan Monumen	12	919.765.915	38.841.757,50
22	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	-	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	5	410.000.000	139.400.000,00
24	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	4	3.264.330.639	18.636.748.279,96
25	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	23	607.682.874	470.175.566,80
26	Akumulasi Penyusutan Instalasi	2	113.700.177	24.007.537,93
27	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-	-	-

28	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Total Akumulasi Awal		3.131	74.816.223.657	50.843.007.380,29

Sumber : Data Diolah

Dari tabel diatas diketahui total penyusutan awal BPPKAD pada tahun 2019 sebesar Rp 50.843.007.380,29 dengan nilai total perolehan sebesar Rp 74.861.223.657. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan masing-masing unit aset tetap.

Pada penyajian akumulasi penyusutan awal ini, akumulasi akhir pun akan diperhitungkan dimana diperoleh setelah diakui adanya Beban dan Reklas (hibah, mutasi aset, inventarisasi, aset lainnya, koreksi) yang dipaparkan sebagai berikut :

a) Pengakuan Beban

Beban diperoleh dari nilai perolehan suatu aset tetap dibagi dengan umur manfaat aset tetap tersebut. Akumulasi penyusutan merupakan semua akumulasi total dari beban penyusutan dalam satu periode waktu satu tahun.

b) Reklas yaitu mengganti/menjurnal balik suatu akun ke akun yang sejenis, ada 6 (enam) kategori yang termasuk dalam reklas disini yaitu:

1) Mutasi Aset

Mutasi aset merupakan perpindahan nilai guna suatu aset kepada aset yang lain akibat adanya pergantian penggunaan dari suatu aset tetap.

2) Inventarisasi

Inventarisasi aset merupakan kegiatan pengecekan aset antara data administratif BMD dengan kondisi fisik BMD yang bersangkutan.

3) Aset Lainnya

Aset Lainnya yang dimaksud di sini yaitu apabila ditemukan aset lain yang harus dicatat ulang pada laporan penyusutan dan menambah nilai akumulasi awal pada aset yang telah ada.

4) Koreksi Aset

Tindakan pembetulan dalam pencatatan nilai aset agar sesuai dengan yang seharusnya.

BPPKAD Kabupaten Magelang memiliki Reklas pada beberapa aset tetap yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 5 : Reklas pada Akumulasi Penyusutan Aset 2019

No.	Keterangan	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Aset lainnya	Koreksi
1	Akm. Pen. Alat Angkutan	193.800.000	336.203.861,43	1.879.477.249,99	
2	Akm. Pen. Alat Kantor & Rumah Tangga		6.982.000,00		
3	Akm Pen. Bangunan Gedung	3.464.205.258,40		143.660.800	
4	Akm. Pen. Jalan dan Jembatan				16.657.918.356,28
	Total	3.658.005.258,40	343.185.861,43	2.023.138.049,99	16.657.918.356,28

--	--	--	--	--

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas, diketahui bahwa terdapat aset yang diakui adanya reklas berupa mutasi keluar, mutasi masuk, aset lainnya, dan koreksi yang kemudian menambah akumulasi awal. Namun, masih ada beban akumulasi pada penyusutan aset tetap ini. Beban tersebut disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 6 : Beban Pada Akumulasi Penyusutan Aset

No.	Keterangan	Beban	Akumulasi Akhir	Nilai Buku
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	163.871.333,4 3	1.352.014.190,8 6	186.795.143,1 4
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	1.226.819.039 ,04	8.682.721.706,0 3	4.150.514.641, 97
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3.691.566,60	171.914.666,40	22.149.399,60
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor & Rumah Tangga	297.565.003,6 0	3.422.649.127,6 0	616.112.366,4 0
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	20.669.628,80	328.759.328,80	35.110.865,20
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Dan Kesehatan	-	-	-

8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	15.561.573,22	320.930.313,22	31.123.146,78
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	138.740.602,00	3.259.192.107,00	123.219.966,00
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemurnian	-	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Peraga	-	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Proses/Produksi	-	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Rambu Rambu	-	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga	-	-	-

20	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	1.960.412.428,08	19.114.665.319,94	27.682.871.763,06
21	Akumulasi Penyusutan Monumen	18.395.318,30	57.237.075,80	862.528.839,20
22	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	-	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	8.200.000,00	147.600.000,00	262.400.000,00
24	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	222.901.435,24	2.201.731.358,92	1.062.599.280,08
25	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	45.148.762,40	515.324.329,20	92.358.544,80
26	Akumulasi Penyusutan Instalasi	4.001.256,32	28.008.794,25	85.691.382,75
27	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Total Akumulasi Akhir		4.125.977.947,03	39.602.748.318,02	35.213.475.338,98

Sumber : Data diolah

c) Akumulasi Akhir

Berdasarkan informasi pada tabel yang telah disajikan diatas, diketahui nilai akumulasi awal pada penyusutan aset tetap BPPKAD Kabupaten Magelang, diakui adanya reklas dan beban. Dengan begitu,

Akumulasi akhir akan diperoleh setelah adanya biaya-biaya reklas dan beban yang mengurangi akumulasi awal. Pada tabel diatas akumulasi penyusutan awal diketahui sebesar Rp 50.843.007.380,29 dengan nilai perolehan sebesar Rp 74.861.223.657. Selanjutnya dikurangi dengan biaya reklas sebesar Rp 3.658.005.258,40 untuk mutasi masuk, dan mutasi keluar sebesar Rp 343.185.861,43, kemudian aset lainnya sebesar Rp 2.023.138.049,99, Koreksi sebesar Rp 16.657.918.356,28, dan beban penyusutan sebesar Rp 4.125.977.947,03. Hasil tersebut kemudian menjadi akumulasi penyusutan akhir aset tetap pada BPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2019 sebesar Rp 39.602.748.318,02.

3.2.5 Jurnal Pencatatan Penyusutan Aset BPPKAD Kabupaten Magelang

Tabel 3. 7: KIBB Peralatan dan Mesin (Alat Komputer Router)

Jenis Barang>Nama Barang	Tahun Perolehan	Umur	Asal Usul	Harga (Rp.)	Keterangan
Alat Komputer Router	2019	4	Pembelian	8.039.286	Awal

Sumber : Data KIB BPPKAD Kabupaten Magelang

Dari Kartu Investasi Barang (KIB) Peralatan Dan Mesin diatas, nilai peralatan berupa Alat Komputer Router adalah sebesar Rp 8.039.286. dan aset tetap dalam keadaan baik.

BPPKAD Kabupaten Magelang menetapkan masa manfaat peralatan dan mesin berupa alat komputer diatas selama 4 tahun, serta disusutkan menggunakan metode garis lurus. Berdasarkan tabel diatas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga ke 4 adalah sebagai berikut:

- a. Nilai aset tetap sebesar Rp 8.039.286
- b. Nilai penyusutan untuk tahun pertama dihitung $Rp\ 8.039.286 : 4 = Rp\ 2.009.821,5$.
- c. Catatan tahun pertama adalah :

Tabel 3. 8: Jurnal Pencatatan Penyusutan

Beban Penyusutan	Rp	2.009.821,5	
Akumulasi Penyusutan			Rp 2.009.821,5

Sumber : Data diolah

- d. Catatan tahun kedua hingga keempat adalah :

Tabel 3. 9: Jurnal Pencatatan Penyusutan

Beban Penyusutan	Rp	2.009.821,5	
Akumulasi Penyusutan			Rp 2.009.821,5

Sumber : Data diolah

3.2.6 Penyajian Penyusutan

Jumlah penyusutan disajikan pada Neraca maupun Laporan Operasional setiap tahunnya. Dengan akumulasi penyusutan dan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap di Neraca, dan tercatat sebagai Beban Penyusutan pada Laporan Operasional. Adanya Neraca, nilai buku aset dapat diketahui sebagai contoh potensi manfaat yang dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan.

Berikut Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku aset tetap pada Neraca BPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 10: Neraca Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019 dan 2018

NERACA		
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG		
Per 31 December 2019 dan 2018		
(Dalam Rupiah)		
URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	31.761.119.634,48	28.143.493.316,48
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(16.829.510.901,70)	(15.881.854.089,44)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	626.595.079,00	756.576.586,00
Jumlah Aset Lancar	15.558.203.811,78	13.018.215.813,04
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen	0,00	0,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	88.545.972.768,00	101.862.879.093,00
Peralatan dan Mesin	22.703.206.969,00	21.431.422.369,00
Gedung dan Bangunan	48.127.302.998,00	38.318.619.794,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.985.713.690,00	21.802.842.302,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(39.602.748.318,02)	(50.843.007.380,29)
Aset Tetap - Dana BOS	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	123.759.448.106,98	132.572.756.177,71
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	1.393.541.750,00	1.295.641.750,00
Aset Lain-lain	3.901.347.571,94	2.913.846.633,38
Akumulasi Amortisasi	(1.245.674.250,00)	(1.147.334.250,00)
Jumlah Aset Lainnya	4.049.215.071,94	3.062.154.133,38
JUMLAH ASET	143.366.866.990,70	148.653.126.124,13

Sumber: Data Diolah

Tabel di atas menunjukkan nilai perolehan aset, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap dalam Neraca BPPKAD Kabupaten Magelang tahun 2019 dan 2018. Aset tetap terdiri dari berbagai jenis aset yang memiliki nilai perolehan masing-masing, akan tetapi penyusutan hanya ditampilkan di satu akun yaitu akumulasi penyusutan. Nilai buku yang disajikan dalam Neraca juga merupakan keseluruhan dari aset tersebut. Nilai perolehan, jumlah penyusutan, akumulasinya dan nilai buku

aset tetap menurut jenisnya tercantum dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Berdasarkan Neraca di atas, bahwa Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan tidak disusutkan. Di luar itu,, seluruh aset tetap disusutkan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 39.602.748.318,02 dan nilai buku sebesar Rp35.213.475.338,98.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pencatatan penyusutan aset tetap pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, maka dapat disimpulkan bahwa BPPKAD Kabupaten Magelang dalam menghitung penyusutan aset daerah menerapkan metode penyusutan yaitu metode garis lurus berdasarkan PSAP No 07 Paragraf 57 dengan mengklasifikasikan aset tetap menjadi 6 (enam) akun yaitu, Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, irigasi, dan jaringan, Konstruksi dalam pengerjaan, dan Aset tetap lainnya. Penyajian Penyusutan dilakukan setiap tahun yang tersaji dalam Neraca sebagai akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset, pada Laporan Operasional disajikan sebagai beban penyusutan. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan, dan akumulasi penyusutan dalam neraca BPPKAD Kabupaten Magelang pada tahun 2019 diketahui bahwa Tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan, namun di luar itu, seluruh aset tetap disusutkan dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp 39.602.748.318,02 dan nilai buku sebesar Rp 35.213.475.338,98.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang serta bagi Pemerintah Daerah di antaranya :

1. Secara umum perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang sudah baik dan terus dipertahankan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Lebih diperhatikan lagi dalam mengelola data BMD terutama untuk pencatatan penyusutan aset agar terciptanya pelaporan yang berkualitas dan dapat diandalkan. Laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai maka akan meningkatkan akuntabilitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, hal tersebut merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga keberhasilan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan adanya kebijakan akuntansi pemerintah dalam penyusunan dan pencatatan laporan keuangan diharapkan mampu meningkatkan kualitas, akurasi dan konsistensi pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, S. (2020). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018*. *Jurnal Valuta*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Volume 1, Issue 1, April 2020, Page 41-54.
- Baso, R., Selfiana, B., Sumarni, S. (2020). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)*. *Jurnal Economic and Digital Business Review*. Volume 1, Issue 1, Januari 2020, Page 65-81.
- Buletin Teknis Nomor 18 Tentang Penyusutan Berbasis Akrua. Retrieved from <http://www.ksap.org>
- Martani, D., Wardhani, R., Tanujaya, E. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Morary, C., Sabijono, H., Tangkuman, S. (2021). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat)*. *Jurnal EMBA*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Volume 9, No. 1, 1 Januari 2021, Page 433-444.
- Nadir, J. (2019). *Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Di Makassar*. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Februari 2019. Retrieved from <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>

- Prandara, R. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat. Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Januari 2020
- Samryn. 2016. *Pengantar Akuntansi, Buku 2*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Saputri, M. (2017). *Analisis Penyusutan Aktiva Tetap Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Artikel*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Mei 2017. Retrieved from <http://id.portalgaruda.org>
- Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Retrieved from <http://www.ksap.org>
- Randa, F., Bangun, Y.K. (2020). *Pemaknaan Penerapan Akuntansi Basis AkruaI. Jurnal AJAR*. Universitas Atma Jaya Makassar. Volume 3, No.1, Februari 2020, Page 48-67.
- Rudianto. 2015. *Akuntansi Koperasi Edisi ke Dua*. Jakarta : Erlangga.

LAMPIRAN



REKAPITULASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Kode Lokasi : 040405

Bidang :

Sub Bidang :

Satuan Kerja : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Tahun : 2019

No.	KODE AKUN	KODE OBJEK	KETERANGAN	JUMLAH	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH TOTAL	TOTAL HARGA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.3.1		TANAH	-	-	171	88.545.972.768	
2		1.3.1.01	TANAH	171	88.545.972.768	-	-	
3	1.3.2		PERALATAN DAN MESIN	-	-	2.694	22.703.206.969	
4		1.3.2.01	ALAT BESAR	4	1.538.809.334	-	-	
5		1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	238	12.833.236.348	-	-	
6		1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	21	194.064.066	-	-	
7		1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	
8		1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.629	4.038.761.494	-	-	
9		1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	78	363.870.194	-	-	
10		1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	-	-	-	-	
11		1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	
12		1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	382	352.053.460	-	-	
13		1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	342	3.382.412.073	-	-	
14		1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	
15		1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	
16		1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	
17		1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	
18		1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	
19		1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	
20		1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	
21		1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-	-	-	-	
22		1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	
23	1.3.3		GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	408	48.127.302.998	
24		1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	391	46.797.537.083	-	-	
25		1.3.3.02	MONUMEN	12	919.765.915	-	-	
26		1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	
27		1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	5	410.000.000	-	-	
28	1.3.4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	29	3.985.713.690	
29		1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	4	3.264.330.639	-	-	
30		1.3.4.02	BANGUNAN AIR	23	607.682.874	-	-	
31		1.3.4.03	INSTALASI	2	113.700.177	-	-	
32		1.3.4.04	JARINGAN	-	-	-	-	
33	1.3.5		ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	
34		1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	
35		1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	-	-	-	-	
36		1.3.5.03	HEWAN	-	-	-	-	
37		1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	
38		1.3.5.05	TANAMAN	-	-	-	-	
39		1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	
40		1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	
41	1.3.6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	
42		1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	
JUMLAH				3.302	163.362.196.425	3.302	163.362.196.425	

Mengetahui,
KEPALA SKPD

Mungkid,

Pengurus Barang

{ }
NIP.

{ }
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2019

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKONING	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT
1	31-Dec-2019	00012/JP/4.4.5.1/2019	4.04.05.01.00.00.1.5.4.01.01	Aset Lain-lain	√	1.605.911.745,00	
			4.04.05.01.00.00.1.3.3.01.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar <i>(Mencatat Reklas Keluar Gedung Bangunan ke Aset Lain-lain)</i>	√		1.605.911.745,00
2		00013/JP/4.4.5.1/2019	4.04.05.01.00.00.1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	√	1.039.028.006,67	
			4.04.05.01.00.00.1.5.4.02.01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Mencatat Akumulasi Penyusutan Reklas Keluar Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain (Usulan Hapus))</i>	√		1.039.028.006,67
3		00014/JP/4.4.5.1/2019	4.04.05.01.00.00.9.3.4.01.01	Beban Non Operasional-LO	√	858.515.636,00	
			4.04.05.01.00.00.1.5.4.01.01	Aset Lain-lain <i>(Mencatat Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan Dari Aset Lain-lain SK Hapus Bupati NO: 180/182/443/KEP/23/2019 Tanggal 31 Desember 2019)</i>	√		858.515.636,00
4		00015/JP/4.4.5.1/2019	4.04.05.01.00.00.1.5.4.02.01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	√	793.614.136,22	
			4.04.05.01.00.00.9.3.4.01.01	Beban Non Operasional-LO <i>(Mencatat Akumulasi Penyusutan Penghapusan Dari Aset Lain-lain SK Hapus Bupati NO: 180/182/443/KEP/23/2019 Tanggal 31 Desember 2019)</i>	√		793.614.136,22
5		00111/JP/4.4.5.1/2019	4.04.05.01.00.00.1.1.3.01.14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	√	25.050.649.281,00	
			4.04.05.01.00.00.8.1.1.14.23	Pasir dan kerikil - LO <i>(Jurnal Penyesuaian Penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2019)</i>	√		25.050.649.281,00
6		00112/JP/4.4.5.1/2019	4.04.05.01.00.00.1.1.3.01.07	Piutang Pajak Restoran	√	19.408.844.926,00	
			4.04.05.01.00.00.8.1.1.07.01	Restoran - LO <i>(Jurnal Penyesuaian Penambahan Piutang Pajak Restoran Tahun 2018)</i>	√		19.408.844.926,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4.04 Unit Organisasi : 4.04.05 Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
27		00139/JP/4.4.5.1/2019	4.04.05.01.00.00.9.1.2.03.01 4.04.05.01.00.00.9.1.2.03.02 4.04.05.01.00.00.9.1.2.03.03 4.04.05.01.00.00.9.1.2.03.06 4.04.05.01.00.00.2.1.5.02.01	Beban Jasa telepon Beban Jasa air Beban Jasa listrik Beban Jasa Kawat/Faksimil/Internet Utang Beban Barang dan Jasa <i>(Jurnal Penyesuaian Mencatat Utang Beban tahun 2019)</i>	√ √ √ √ √	96.451,00 524.385,00 7.004.055,00 783.360,00	8.408.251,00
28		00140/JP/4.4.5.1/2019	4.04.05.01.00.00.9.1.7.01.01 4.04.05.01.00.00.1.3.7.01.01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat <i>(Mencatat Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Alat Berat Tahun 2019)</i>	√ √	163.871.333,43	163.871.333,43
29		00141/JP/4.4.5.1/2019	4.04.05.01.00.00.9.1.7.01.04 4.04.05.01.00.00.1.3.7.01.04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Mencatat Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Tahun 2019)</i>	√ √	1.329.795.717,62	1.329.795.717,62
30		00142/JP/4.4.5.1/2019	4.04.05.01.00.00.9.1.7.01.09 4.04.05.01.00.00.1.3.7.01.04	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Mencatat Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Alat Bengkel Tahun 2019)</i>	√ √	3.691.566,60	3.691.566,60
31		00144/JP/4.4.5.1/2019	4.04.05.01.00.00.9.1.7.01.14 4.04.05.01.00.00.1.3.7.01.14	Beban Penyusutan Alat Kantor Akumulasi Penyusutan Alat Kantor <i>(Mencatat Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2019)</i>	√ √	436.305.605,60	436.305.605,60
32		00145/JP/4.4.5.1/2019	4.04.05.01.00.00.9.1.7.01.35 4.04.05.01.00.00.1.3.7.01.35	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan <i>(Mencatat Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Alat Komunikasi tahun 2019)</i>	√ √	20.669.628,80	20.669.628,80



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2019

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
Urusan Pemerintahan		: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
Bidang Pemerintahan		: 4 . 04	Keuangan				
Unit Organisasi		: 4 . 04 . 05	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
Sub Unit Organisasi		: 4 . 04 . 05 . 01	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
33		00146/JP/4.4.5.1/2019	4.04 . 05 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 35 4.04 . 05 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 35	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan <i>(Mencatat Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Alat Keamanan dan Perlindungan Tahun 2019)</i>	√ √	15.561.573,22	15.561.573,22
34		00147/JP/4.4.5.1/2019	4.04 . 05 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 02 . 01 4.04 . 05 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja <i>(Mencatat Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2019)</i>	√ √	1.967.520.828,08	1.967.520.828,08
35		00148/JP/4.4.5.1/2019	4.04 . 05 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 02 . 07 4.04 . 05 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 07	Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya <i>(Mencatat Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Monumen Tahun 2019)</i>	√ √	26.595.318,30	26.595.318,30
36		00149/JP/4.4.5.1/2019	4.04 . 05 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 03 . 01 4.04 . 05 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 01	Beban Penyusutan Jalan Akumulasi Penyusutan Jalan <i>(Mencatat Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan Tahun 2019)</i>	√ √	249.859.813,28	249.859.813,28
37		00150/JP/4.4.5.1/2019	4.04 . 05 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 03 . 11 4.04 . 05 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih <i>(Mencatat Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Bangunan air Irigasi Tahun 2019)</i>	√ √	45.148.762,40	45.148.762,40
38		00151/JP/4.4.5.1/2019	4.04 . 05 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 03 . 21 4.04 . 05 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik <i>(Mencatat Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Instalasi Jaringan Listrik Tahun 2019)</i>	√ √	4.001.256,32	4.001.256,32
39		00152/JP/4.4.5.1/2019	4.04 . 05 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 06 . 05 4.04 . 05 . 01 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya Akumulasi Amortisasi <i>(Mencatat Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud Software)</i>	√ √	98.340.000,00	98.340.000,00



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
Urusan Pemerintahan : 4 - 04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	
Unit Organisasi : 4 - 04 - 05	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Sub Unit Organisasi : 4 - 04 - 05 - 01	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	31.761.119.634,48	28.143.493.316,48
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Pernyataan Piutang	(16.829.510.901,70)	(15.881.854.089,44)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	626.595.079,00	756.576.586,00
JUMLAH ASET LANCAR	15.558.203.811,78	13.018.215.813,04
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	88.545.972.768,00	101.862.879.093,00
Peralatan dan Mesin	22.703.206.969,00	21.431.422.369,00
Gedung dan Bangunan	48.127.302.998,00	38.318.619.794,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.985.713.690,00	21.802.842.302,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(39.602.748.318,02)	(50.843.007.380,29)
Aset Tetap - Dana BOS	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	123.759.448.106,98	132.572.756.177,71
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	1.393.541.750,00	1.295.641.750,00
Aset Lain-lain	3.901.347.571,94	2.913.846.633,38
Akumulasi Amortisasi	(1.245.674.250,00)	(1.147.334.250,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	4.049.215.071,94	3.062.154.133,38
JUMLAH ASET	143.366.866.990,70	148.653.126.124,13
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00

NERACA

www.bppkad.bps.go.id

Halaman 1 dari 2

Lampiran 3: Neraca BPPKAD Kabupaten Magelang

Urusan Pemerintahan	: 4 . 04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	
Unit Organisasi	: 4 . 04 . 05	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Sub Unit Organisasi	: 4 . 04 . 05 . 01	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	URAIAN	2019	2018
	Pendapatan Diterima Dimuka	437.700.650,42	300.124.472,43
	Utang Beban	8.408.251,00	6.163.667,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	446.108.901,42	306.288.139,43
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	446.108.901,42	306.288.139,43
	EKUITAS		
	EKUITAS	142.920.758.089,28	148.346.837.984,70
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	143.366.866.990,70	148.653.126.124,13



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 005.020/Ket/20/Akd/II/2021
Lamp : -
Perihal : Permohonan izin
mahasiswa magang/riset

Kepada Yth.
Pimpinan Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)
Jl. Soekarno Hatta, Patran, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56511

Assalamu'alaikum Wr Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah yang merupakan laporan hasil magang/riset mereka di perusahaan/instansi. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami dibawah ini :

No	NIM	Nama	Jurusan
1	18212078	Ida Dwi Lestari	Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan magang di **Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)** pada tanggal 01 Maret - 30 April 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu pimpinan dapat menerima dan menilai mahasiswa/i kami dalam Buku Perkembangan Pelaksanaan Magang (BPPM).

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 11 Februari 2021
Ketua Prodi D3 Akuntansi



Dr. Marfuah, M.Si, Ak., AC



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno Hatta No. 20 Telp.(0293) 788249 Faks 789549

Kota Mungkid 56511

Website : <http://dpmptsp.magelangkab.go.id>

Kota Mungkid, 23 Februari 2021

Nomor : 070/74/16/2021
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Praktek Kerja Lapangan

Kepada :
Yth. **IDA DWI LESTARI**
Dusun Ngargosoko Wetan RT. 02
RW. 04 Desa Ngargosoko
Kecamatan Srumbung Kabupaten
Magelang
di
MAGELANG

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor :
411.3/108/47/2021 Tanggal 23 Februari 2021, Perihal Rekomendasi.

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Riset/Penelitian/ PKL di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh saudara :

Nama : **IDA DWI LESTARI**
Pekerjaan : Mahasiswi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat : Dusun Ngargosoko Wetan RT. 02 RW. 04 Desa Ngargosoko Kecamatan
Srumbung Kabupaten Magelang
Nomor HP : 085601464881
Penanggung Jawab : **Dra. Marfuah, M.Si, Ak., AC**
Lokasi : BPPKAD Kabupaten Magelang
Waktu : 01 Maret 2021 s/d 30 April 2021
Peserta : -
Tujuan : **PELAKSANAAN MAGANG/KERJA PRAKTIK**

Sebelum Melaksanakan Kegiatan Penelitian/PKL agar Saudara Mengikuti Ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan kepada Pejabat Pemerintahan setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar menyampaikan laporan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bappeda dan Litbangda dan Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang.
4. Surat Izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

a.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG

Ub

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan



ENI RETNAWATI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 196701191986072001

Tembusan :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan/ Dinas. Kantor/Instansi terkait



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Aci Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

Nomor : 004.010/Ket/20/Akd/III/2021
Lamp :
Perihal : **Permohonan izin
pengambilan data**

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan/HRD
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Magelang
Jl. Soekarno Hatta, Patran, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56511

Assalamu'alaikum Wr Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Diploma III Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah yang merupakan laporan hasil magang/riset mereka di perusahaan/instansi. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami :

Nama : Ida Dwi Lestari
No Mhs : 18212078
Jurusan : Akuntansi
Judul : Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang
No Hp : 085601464881

Bermaksud untuk melakukan pengambilan data di **Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Magelang**. Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data tersebut kepada mahasiswa kami.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 31 Maret 2021
Kedua Prodi D3 Akuntansi

Agus M. Si, Ak., CA., Cert.S.A.P.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp./Fax. (0293) 788103
Kode Pos 56511 Website : www.magelangkab.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR 423.4/ 686 /23/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : FARNIA BERLIANI SRI TULODHO, AP
- b. Jabatan : Plt. Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama / NIM : IDA DWI LESTARI / 18212078
- b. Jurusan : D3 Akuntansi
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

benar-benar telah melaksanakan kegiatan Magang (Kerja Praktik) terhitung mulai tanggal 1 Maret s.d. 30 April 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kota Mungkid, 4 Mei 2021
a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Plt. Sekretaris
Kepala Bidang P3SP



FARNIA BERLIANI SRI TULODHO, AP
Pembina
NIP. 197602121995022001

